



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KOTA BEKASI**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, kami sampaikan Puji Syukur kepada Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2020 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2022 ini untuk memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan Laporan Penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2022 dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Kami menyadari Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2022 ini masih terdapat keterbatasan, untuk itu saran perbaikan dari semua pihak sangat kami harapkan guna kesempurnaan pada masa-masa yang akan datang berdasarkan kesadaran, komitmen dan ketulusan serta keinginan yang terbaik bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat dan staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. Demikian kiranya, untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

Bekasi,

2023

**KEPALA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI**



**KARTO S.IP, M.SI**  
PEMBINA UTAMA MUDA / IV c  
NIP 19670415 198603 1 005

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
BAB I Pendahuluan .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi .....	5
1.3. Aspek Strategis Organisasi .....	5
1.4. Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi .....	7
1.5. Sistematika Penyajian .....	19
BAB II Perencanaan Kinerja .....	22
2.1. Rencana Strategis .....	22
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	22
2.1.2. Indikator Kinerja Utama .....	25
2.2. Perjanjian Kinerja .....	27
BAB III Akuntabilitas Kinerja .....	31
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	32
3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama .....	34
3.3. Realisasi Anggaran .....	69
BAB IV Penutup .....	73
4.1. Kesimpulan .....	73
4.2. Rencana Tindak Lanjut.....	74

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.4.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	11
Tabel 1.4.2	Rekapitulasi Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2022.....	12
Tabel 1.4.3	Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis Satuan Polisi Pamong Praja.....	13
Tabel 1.4.4	Rekapitulasi Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2021.....	13
Tabel 1.4.5	Kebutuhan Personil Penunjang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	14
Tabel 2.1.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	23
Tabel 2.1.2	Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	25
Tabel 2.2.1	Perjanjian Kinerja .....	29
Tabel 2.2.2	Alokasi Anggaran .....	30
Tabel 3.1.1	Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2022..	34
Tabel 3.2.1	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban.....	36
Tabel 3.2.2	Jumlah Kasus Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban.....	36
Tabel 3.2.3	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Program terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada.....	38
Tabel 3.2.4	Analisis Capaian Nilai Indikator Prosentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada Dengan Tahun Sebelumnya.....	39
Tabel 3.2.5	Analisis Capaian Nilai Indikator Prosentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada Dengan Tahun Sebelumnya.....	40
Tabel 3.2.6	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Terhadap Target Akhir Renstra 2018-2023.....	40
Tabel 3.2.7	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban .....	42
Tabel 3.2.8	Jumlah personil yang mendukung pencapaian indicator sasaran strategis Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada .....	45
Tabel 3.2.9	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi TA.2022.....	46
Tabel 3.2.10	Rincian Hasil Penilaian Komponen AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2022.....	47
Tabel 3.2.11	Perbandingan Hasil Penilaian Komponen AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2022.....	48
Tabel 3.2.12	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Program terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian Nilai AKIP.....	49
Tabel 3.2.13	Analisis Capaian Nilai Indikator Pencapaian Nilai AKIP Dengan Tahun Sebelumnya .....	49

Tabel 3.2.14	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Pencapaian Nilai AKIP Terhadap Target Akhir Renstra 2018-2023.....	50
Tabel 3.2.15	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama pencapaian Nilai AKIP..	51
Tabel 3.2.16	Jumlah personil yang mendukung pencapaian indicator sasaran strategis pencapaian Nilai AKIP.....	53
Tabel 3.2.17	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi TA.2022.....	55
Tabel 3.2.18	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kantrantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	56
Tabel 3.2.19	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Penanganan Unjuk Rasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	57
Tabel 3.2.20	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Penertiban Bangunan Tidak Berijin pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	58
Tabel 3.2.21	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Penertiban THPP, Miras dan PSK pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	58
Tabel 3.2.22	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Penertiban PMKS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	59
Tabel 3.2.23	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Penertiban Reklame Tidak Berijin pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi..	60
Tabel 3.2.24	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Patroli Rutin pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	61
Tabel 3.2.25	Hasil Analisis perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	62
Tabel 3.2.26	Perbandingan Hasil Penilaian Komponen SKM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2022.....	63
Tabel 3.2.27	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Program terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian Nilai IKM.....	64
Tabel 3.2.28	Analisis Capaian Nilai Indikator Pencapaian Nilai IKM Dengan Tahun Sebelumnya.....	66
Tabel 3.2.29	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Pencapaian Nilai IKM Terhadap Target Akhir Renstra 2018-2023.....	66
Tabel 3.2.30	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada.....	67
Tabel 3.2.31	Jumlah personil yang mendukung pencapaian indicator sasaran strategis Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada.....	69
Tabel 3.3.1	Program, Kegiatan dan Anggaran Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	71

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tahun 2022 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi adalah sebagai sarana bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Wali Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada



masyarakat di seluruh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dan Kota Bekasi;

2. Menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dan Kota Bekasi terhadap penyelenggara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi .  
Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023. IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berkaitan langsung dengan Misi yang ada di Perubahan RPJMD Kota Bekasi maupun Sasaran yang ada pada Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja adalah persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang digunakan untuk menjadi tolak ukur pencapaian sasaran strategis pada renstra tahun 2018-2023 yaitu Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Penetapan sasaran

strategis ini untuk menunjang pencapaian misi V yakni “Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman terutama dalam menunjang indicator kinerja sasaran. Sasaran 1 : terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat

2. Indikator kinerja utama satuan polisi pamong praja yang kedua adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dipergunakan untuk menjadi tolak ukur pencapaian sasaran strategis pada Renstra tahun 2018-2023 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi V yakni “Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman terutama dalam menunjang indicator kinerja sasaran. Jika melihat capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022 diperoleh capaian kinerja dengan nilai sebesar 85,74.

Sejalan dengan hal tersebut diharapkan pada Tahun 2022 Satpol PP dapat lebih meningkatkan capaian kinerja terutama terhadap indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Ada pun kinerja yang di tingkatkan pada tahun ini sebagai berikut :

1. Target indikator kinerja yang harus di capai tahun 2021 telah berubah menjadi Presentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada adalah dengan target capaian sebesar 8%, maka tantangan yang harus di hadapi oleh satuan polisi pamong praja adalah bisa mencapai target tersebut atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

2. Untuk indikator indeks kepuasan masyarakat di satuan polisi pamong praja memperoleh pencapaian kinerja 2022 dengan predikat B, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 85,74

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada Tahun 2022 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada BAB III (AKUNTABILITAS KINERJA) pada Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2022 ini.

## **1.2. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 tahun 2013. Selanjutnya untuk mengatur pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi ditetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

## **1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan bagian dari pelayanan kebutuhan dasar masyarakat oleh Satpol PP, dimana dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masih belum memenuhi harapan masyarakat. Terlebih dalam situasi global-internasional yang semakin menantang dengan segala tuntutan dan diskursus yang secara jelas menunjukkan ada gap antara harapan masyarakat dan fakta yang terjadi.

Kota Bekasi sebagai kota metropolitan dan mitra ibukota yang memiliki peran strategis dalam memperkuat kondusifitas wilayah sebagai faktor pendukung penyelenggaraan pemerintahan. Dengan tipikal penduduk yang berasal dari kalangan masyarakat heterogen baik suku, bangsa di Indonesia sehingga membutuhkan suatu upaya harmonisasi yang mampu meredam maupun meminimalisir berbagai konflik dan kerawanan sosial dari mulai vertikal maupun horizontal dalam rangka terciptanya ketentraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu permasalahan keamanan dan ketertiban merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang ideal dalam masyarakat agar semua kegiatan dan aktifitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil.

Pada hakekatnya upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berperan dalam mewujudkan hal tersebut. Dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat.

#### 1.4. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyuluhan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyuluhan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Bimbingan Teknis Implementasi
		Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Konsultasi Keluar Daerah			

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini
			Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka

			ketentraman dan ketertiban umum
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

*Sumber : Renja 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi*

Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk membantu Kepala Daerah sangat komprehensif dan kompleks, karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam

menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat.

Dalam kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan penyelenggaraan ketenteraman ketertiban umum harus diupayakan dengan pendekatan preemtif, preventif, represif dan rehabilitatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu dalam pelaksanaannya Satpol PP Kota Bekasi dituntut menerapkan standar dan tolak ukur kinerja yang ditentukan di dalam perencanaan strategis dan juga mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal.

Dasar hukum penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Urusan Ketentraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pengukuran hasil kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja dinas dimana telah ditentukan indikator sasaran dan program, rumusan penghitungan indikator kinerja kegiatan, target capaian di dalam rencana strategis perubahan 2018-2023 dan juga capaian kinerjanya. Adapun **Standar Pelayanan Minimal yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi** berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah **Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada dengan target sebesar 100 persen.**

Dalam pencapaian kinerja pelayanan tersebut, dibutuhkan dukungan personil atau sumber daya manusia, dalam hal ini adalah pegawai ASN dan Non ASN dilingkungan Satpol Polisi



Pamong Praja Kota Bekasi. Dimana pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi serta kewenangannya melakukan penegakkan PERDA, menjaga dan memelihara Keamanan, Ketentraman dan ketertiban pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, terdiri atas komposisi jumlah 728 orang yang terdiri dari 224 orang ASN dan 504 orang Non ASN. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan jabatan dapat disajikan dalam Tabel berikut :

**Tabel 1.4.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	1
2	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota	1
3	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	1
4	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Dan	1
5	Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan	1
6	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Dan Peratuan Lainnya	1
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat	1
8	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	1
9	Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat	1
10	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga	1
11	Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat	1
12	Kepala Seksi Ketertiban Umum	1
13	Kepala Seksi Bimbingan Dan Penyuluhan Tertib	1
14	Kepala Seksi Bimbingan Dan Penyuluhan	1
15	Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dan Bina Personil	1
16	Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan	1
17	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian	1
18	Kepala Seksi Kewaspadaan Dini	1
19	Kepala Seksi Bina Lingkungan	1
20	Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi	1
21	Kepala Seksi Data dan Informasi	1

NO	JABATAN	JUMLAH
22	Pejabat Fungsional	56
23	PNS (Pelaksana staff perbagian )	147
24	Non PNS	504
	Jumlah	728

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2022

Adapun rincian personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi menurut jenjang pendidikan dapat disajikan kedalam Tabel berikut:

**Tabel 1.4.2**  
**Rekapitulasi Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2022**

No	Pendidikan	PNS	TKK
1.	S3	1	-
2.	S2	9	2
3.	S1	71	179
4.	D3	2	26
	D2	1	-
	D1	-	-
5.	SLTA	129	29
6.	SLTP	7	4
7.	SD	4	1
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>224</b>	<b>504</b>

Sumber: Satpol PP Kota Bekasi, 2022.

Tentunya kualifikasi pendidikan akan mendukung profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan seluruh tugas-tugas pada Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, namun tentunya kualifikasi pendidikan umum tidaklah cukup untuk menjamin zero korban terdampak penegakan Perda dan Perkada, harus ada intervensi dari Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengirimkan personil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis.

Adapun rincian personil Satuan Polisi Pamong Praja yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis sebagai berikut:

**Tabel 1.4.3**  
**Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis Satuan Polisi Pamong Praja**

No	Jenis Kediklatan	Jumlah
1	Struktural	21
2	Fungsional	56
3	Pemerintahan	1
4	Teknis	45
5	Diklat Dasar Satpol PP	194
<b>Jumlah</b>		<b>317</b>

Sumber: Satpol PP, 2022.

**Tabel 1.4.4**  
**Rekapitulasi Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2021**

No	Pendidikan	PNS	TKK
1.	S3	1	-
2.	S2	9	2
3.	S1	71	179
4.	D3	2	26
	D2	1	-
	D1	-	-
5.	SLTA	129	29
6.	SLTP	7	4
7.	SD	4	1
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>224</b>	<b>504</b>

Sumber: Satpol PP Kota Bekasi, 2022.

Dengan jumlah personil 728 orang dan prosentase aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis yang baru mencapai 69,51

persen atau sekitar 317 orang, maka kedepan Pemerintah Kota Bekasi harus segera menyelesaikan 30.49 persen lagi untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan teknis untuk menjamin pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk mengoptimalkan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam pencapaian kinerja pelayanan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi telah memetakan kebutuhan personal teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum sebagai berikut:

**Tabel 1.4.5**  
**Kebutuhan Personal Penunjang Standar Pelayanan Minimal**  
**Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
1.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Administrasi Negara/Publik	4
2.	Pengadministrasi Umum	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran	7
3.	Pengadministrasi Kepegawaian	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran	4
4.	Pengelola Barang Persediaan	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi Perkantoran/ Tata Perkantoran	3
5.	Pranata Kearsipan	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Kearsipan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2022

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
8.	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi/Sosial/ Administrasi Negara/ Pemerintahan/ Kebijakan Publik	2
9.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran	2
10.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi pembangunan/ Akuntansi/ Manajemen	2
11.	Pengelola Bahan Perencanaan	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Infomatika/ Akuntansi/ Manajemen	2
12.	Verifikator Keuangan	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi Perkantoran	2
13.	Bendahara	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/ manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
14.	Pengadministrasi Keuangan	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran	2
15.	Penata Laporan Keuangan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi/ Manajemen/ Akuntansi	1
16.	Pengolah Data Laporan Keuangan	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika/ Administrasi Perkantoran/ Manajemen	1
17.	Pengelola Gaji	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/ Manajemen/Administrasi/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika	2

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2022

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
18.	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang Manajemen/ Ekonomi/ Ilmu pemerintahan/ Ilmu administrasi/ kebijakan publik/ Ilmu Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	2
19.	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Minimal Diploma III di bidang Teknik Infomatika/ teknik komputer/ Administrasi Pekantoran	15
20.	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran	24
21.	Petugas Keamanan	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang yang dibutuhkan	326
22.	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	SLTA/ DI/ DII/ DIII semua bidang dan telah mengikuti pelatihan gada pratama/ madya/ utama (bersertifikat)	140
23.	Analisis Polisi Pamong Praja	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Pemerintahan/Hukum/ Administrasi Negara/ Sosial politik	1
24.	Analisis Keamanan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/ Pemerintahan/Sosial Politik	2
25.	Petugas Keamanan	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang yang dibutuhkan	102
26.	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Sosial dan Politik/ Sosiologi/ Kebijakan Publik/ Psikologi Masyarakat	1
27.	Analisis Pengaduan Masyarakat	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Pemerintahan/Sosial dan Politik/ Sosiologi/ Kebijakan Publik/ Psikologi Masyarakat	1

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2022

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
28.	Pengolah Data Penindakan dan Sarana Operasi	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika/ Administrasi Perkantoran/ Manajemen	1
29.	Analisis Produk Hukum	S-1 (Strata-Satu) Hukum	1
30.	Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika/ Administrasi Perkantoran/ Manajemen	1
31.	Petugas Penindakan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma Empat) bidang hukum/atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6
32.	Pengelola Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen/ Administrasi/Pemerintahan/ Teknik Infomatika/Manajemen Teknik Infomatik	1
33.	Penyusun Bahan Materi Penyuluhan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Ekonomi/ Administrasi/ Psikologi	2
34.	Pengelola Bimbingan Masyarakat	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Kesejahteraan Sosial/Sosiologi/Sosial dan Politik	2
35.	Analisis Pengawasan Pelaku Usaha	Sarjana(S 1)/Diploma IV bidang Akuntansi/Manajemen/Hukum	1
36.	Penyusun Bahan Pengawasan Pelaku Usaha	Sarjana (S 1)/ Diploma IV bidang Agama/ Sosiologi/Filsafat Islam	1
37.	Analisis Pengaduan masyarakat	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Pemerintahan/Sosial dan Politik/ Sosiologi/KebijakanPublik/ Psikologi Masyarakat	1

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
38.	Pengelola Pengaduan Publik	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Administrasi/ Komunikasi/ Teknik Infomatika/Teknik Komputer	2
39.	Analisis Pelanggaran Disiplin	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Akuntansi/Manajemen/Hukum	2
40.	Analisis Perlindungan Masyarakat	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Statistik/Penelitian/Hukum/Kebijakan Publik	1
41.	Pranata Perlindungan Masyarakat	SLTA/D1/D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	2
42.	Pengadministrasi Umum	SLTA/D1/D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/Administrasi Perkantoran/Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	
43.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/ Teknik Lingkungan/ Teknik Arsitektur dan Perencanaan Wilayah Kota/ Manajemen/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi Studi Pembangunan	1
44.	Pengolah Data	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Informatika/ Manajemen Informatika	1
45.	Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat	SLTA/ DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga)	1



No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
46.	Pemeliharaan sarana dan prasarana	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan	1
47.	Pengadministrasi Pelatihan	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran	1
48.	Pol PP Pemula	SLTP/SLTA	9
49.	Pol PP Terampil	SLTA	44
50.	Pol PP Mahir	SLTA/D3/S1	36
51.	Pol PP Penyelia	SLTA/D3/S1	0
52.	Pol PP Ahli pertama	S1/D-4	31
53.	Pol PP Ahli Muda	S1/D-4/S2/S3	8
54.	Pol PP Ahli Madya	S1/D-4/S2/S3	0

Sumber: Satpol PP Kota Bekasi, 2022.

### 1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2022 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi;

kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematis penyajian

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum

### B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
  - 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun keggalan pencapaian kinerja.
- C. Akuntabilitas Anggaran
- Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.
- D. Prestasi Organisasi
- Menampilkan prestasi yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagai organisasi mulai dari tingkat kota, provinsi maupun nasional yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam kurun waktu 2022.

#### BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2018-2023 memberi mandat bahwa arah kebijakan peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk didalamnya kecamatan. Selanjutnya dalam tahapan peningkatan tata kelola pemerintahan diarahkan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung pembangunan di Kota Bekasi.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam visi Kota Bekasi dirumuskan 5 misi Kota Bekasi yang 2 diantaranya terkait langsung dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yaitu “Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik” dan “Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Kehidupan Kota Yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman”. Berdasarkan RPJMD tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2018- 2023.

##### **2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi terdapat tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi beserta indikator. Tujuan adalah hasil akhir yang akan

dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yaitu :

**Tabel 2.1.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	01.31	01.31	01.31	01.31	01.31
			Jumlah personil yang mengikuti diklat	30	30	30	30	30
			Prosentase penegakan perda	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
			Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	60,00	65,00	65,00	70,00	70,00
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00
			Nilai AKIP	B	BB	BB	BB	BB

Sumber : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi 2018-2023 (perubahan)

### **2.1.2. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dalam mengukur peningkatan kinerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi digunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Sedangkan untuk mengukur peningkatan layanan kepada masyarakat digunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya

untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, menyebutkan Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 2.1.2**  
**Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN				KET
					ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	Anggota Satlinmas	Rasio	1;31	Satlinmas organisasi yang di bentuk oleh pemerintah beanggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi,memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat,kegiatan sosial masyarakat	1 Jumlah 31 anggota Satlinmas perkelurahan	SATPOL PP	Bidang Satlinmas	Terdiri dari 31 orang setiap kelurahan yang ada

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2022**

2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan keindahan	%	100	Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 menyebutkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat salah satu bagian dari Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah yang termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib, selanjutnya Pasal 255 : Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, maka konsentrasi Penurunan jumlah pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menjadi prioritas Utama Pemerintah Daerah dalam memelihara Ketenteraman, Ketertiban Umum.	2	Jumlah pengaduan yang ditangani .....x100% Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	SATPOL PP	Laporan Kegiatan LPPD di Bidang Trantibum	jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk dan dapat ditangani dan di selesaikan dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum
3	Persentase penegakan pelanggaran perda	Meningkatnya penegakan hukum	%	100	Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) pasal 43 ayat 3 Jo pasal 41 ayat 1. Pasal 8 ayat (1) JO. Pasal 2 ayat (2) Huruf A dan B Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Larangan Pembuatan Tuna Susila PERMENDAGRI No.86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah	3	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakan .....x100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	SATPOL PP	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	Terlaksananya optimalisasi perda dan perkada

Sumber : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi 2018 -2023 (perubahan)



## 2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2022 merupakan target kinerja tahun kedua dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi 2018-2023, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. Selanjutnya target kinerja tersebut dijabarkan dalam target per triwulan sebagai bahan evaluasi per triwulan.

Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam Perjanjian Kinerja (Tabel 2.2.1) beserta Alokasi Anggaran per triwulan (Tabel 2.2.2) :

**Tabel 2.2.1**  
**Perjanjian Kinerja**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	TRIWULAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Prosentase penurunan tingkat pelanggaran Perda dan Perkada	%	100%	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	100%
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai	A	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	A
		IKM	Nilai	B	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	B

Tabel. 2.2.2  
Alokasi Anggaran

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			Rp	KEU (%)	FISIK (%)
	Satuan Polisi Pamong Praja	93.070.163.280	86.091.344.372	92,5	99,89
	Satuan Polisi Pamong Praja	93.070.163.280	86.091.344.372	92,5	99,89
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	73.647.796.940	69.140.453.672	93,88	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.780.058.000	34.066.979.603	92,62	100
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.780.058.000	34.066.979.603	92,62	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.002.000	24.950.000	41,58	100
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	15.000.000	30	100
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.002.000	9.950.000	99,48	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	665.000.000	635.041.586	95,49	100
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.000.000	74.509.000	99,35	100
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000	49.512.312	99,02	100
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	326.079.000	315.857.750	96,87	100
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	83.921.000	72.605.550	86,52	100
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	29.874.000	99,58	100
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	92.682.974	92,68	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000	83.350.000	83,35	100
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	83.350.000	83,35	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.168.298.940	32.507.966.040	95,14	100
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	825.000.000	733.220.971	88,88	100
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.343.298.940	31.774.745.069	95,3	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.874.438.000	1.822.166.443	97,21	100
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	149.488.000	146.980.558	98,32	100
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.399.950.000	1.353.452.985	96,68	100
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.000.000	123.850.000	99,08	100
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	197.882.900	98,94	100
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	19.422.366.340	16.950.890.700	87,28	99,46

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2022

	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>18.522.366.340</b>	<b>16.178.191.200</b>	<b>87,34</b>	<b>99,43</b>
17	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	500.000.000	420.029.500	84,01	100
18	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	667.760.000	505.521.000	75,7	100
19	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	425.000.000	227.913.000	53,63	100
20	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.820.382.440	13.344.501.400	90,04	100
21	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	554.000.000	539.218.000	97,33	100
22	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	414.350.000	323.522.000	78,08	100
23	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.035.498.900	817.486.300	78,95	100
24	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	105.375.000	0	0	0
	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>700.000.000</b>	<b>593.699.500</b>	<b>84,81</b>	<b>100</b>
25	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	200.000.000	193.834.500	96,92	100
26	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	200.000.000	198.330.000	99,17	100
27	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	300.000.000	201.535.000	67,18	100
	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>200.000.000</b>	<b>179.000.000</b>	<b>89,5</b>	<b>100</b>
28	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	200.000.000	179.000.000	89,5	100
	<b>TOTAL</b>	<b>93.070.163.280</b>	<b>86.091.344.372</b>	<b>92,5</b>	<b>99,89</b>

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja, dan Penetapan Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang dilaksanakan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna

mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan menggunakan media formulir Pengukuran Kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

### **3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian kinerja yang telah dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi selama tahun 2022, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tahun 2018-2023.

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kinerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

Dengan melihat 3 indikator untuk mengukur 2 (dua) sasaran strategis dimana rata rata capaian indikator tercapai/terlampai maka capaian indikator kinerja tersebut semestinya mendukung kepada ketercapaian indikator tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam Mewujudkan Kota Bekasi yg tertib dan aman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi capaian Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dengan tingkat akuntabilitas kinerja A.

Hal tersebut menunjukan bahwa indikator sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi mendukung tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dan mendukung capaian sasaran startegis pada RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman serta Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat.

**Tabel 3.1.1**  
**Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi**  
**Tahun 2022**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Terwujudnya Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	%	100%	100%	100%
			Jumlah personil yang mengikuti diklat	%	100%	100%	100%
			Prosentase penegakan perda	%	100%	100%	100%
			Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Nilai	B	B	Tercapai
			Nilai AKIP	Nilai	A	A	Terlampau

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan, 2022

### **3.2. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya penyelenggaraa ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat**

##### **1. Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada**

Indikator Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada ditetapkan sebagai indikator sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk mengukur sejauh mana masyarakat merasa aman adalah dengan adanya penurunan jumlah pelanggaran ketenteraman dan ketertiban. Indikator ini juga untuk menunjang Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran pada Misi V RPJMD 2018-2023.

Untuk mengukur Persentase indikator tersebut berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Keamanan dan ketertiban penting untuk mewujudkan kota yang kondusif sehingga masyarakat merasakan aman dan nyaman saat beraktivitas.

Capaian Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada pada tahun 2022 diperoleh realisasi 100 persen dari target sebesar 100 persen.

Capaian target indikator Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.2.1**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022
			Target	Realisasi	
1	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada	Persen	100	100	100%

Sumber: Diolah, 2022.

Dengan melihat tabel di atas, capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada tahun 2022 melampaui target yang diharapkan. Sejalan dengan perubahan indikator Kinerja Utama maka terdapat pula perubahan penggunaan data sumber untuk variabel penghitungan sehingga secara pelaporan LKIP Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan laporan LKIP Tahun sebelumnya yaitu 2022.

Adapun rincian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban pada tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2.2**  
**Jumlah Kasus Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban**

No	Kejadian	Tahun	
		2021	2022
1.	Pembunuhan	4	4
2.	Penganiayaan Berat	52	56
3.	Pencurian Berat	181	182

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2022

No	Kejadian	Tahun	
		2021	2022
4.	Pencurian dengan Kekerasan	17	13
5.	Pencurian Roda 2	140	180
6.	Pencurian Roda 4	13	2
7.	Pemerasan dan Ancaman	39	40
8.	Kebakaran	13	1
9.	Perjudian	8	16
10.	Perkosaan	1	0
11.	Narkoba	305	252
12.	Penggelapan	92	118
13.	Penipuan	181	747
14.	Pengrusakan	16	6
15.	Pembakaran	0	5
16.	Pengeroyokan	41	51
17.	Penadahan	2	17
18.	Pencurian Biasa	75	130
19.	Pencabulan/Perzinahan/Asusila	29	95
20.	Perbuatan Tidak Menyenangkan	16	16
21.	Penyerobotan Tanah	16	24
22.	Pemalsuan Surat/Keterangan Palsu	19	23
23.	Fitnah	10	4
24.	Penghinaan	4	6
25.	Pencemaran Nama Baik	17	22
26.	Penganiayaan Ringan	37	45
27.	Senjata Tajam	39	61
28.	Kejahatan Dalam Rumah Tangga	0	54
30.	Pelanggaran Hak Cipta	5	1
31.	Penculikan	71	1
32.	Kejadian lain-lain	305	117
<b>Jumlah</b>		<b>1.920</b>	<b>2.290</b>

Sumber: Satpol PP Kota Bekasi, 2022

Adapun faktor penentu keberhasilan pencapaian target indikator Prosentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi diantaranya:

1. Komitmen Pimpinan untuk dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
3. Adanya produk-produk peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
4. Terobosan dan Inovasi dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum.

Pencapaian Indikator Prosentas Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada didukung oleh Indikator Program pada beberapa perangkat Daerah sebagai berikut:

**Tabel 3.2.3**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Program terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	%	100	100
2	Rasio Linmas tiap Kelurahan	Rasio	1:31	1:31

*Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi , 2022*

Dengan melihat capaian indikator program yang mendukung Pencapaian Indikator Prosentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada pada Satuan Polisi

Pamong Praja, dimana kedua indikator tercapai maka sangat wajar apabila capaian kinerja Prosentase Penurunan Tingkat pelanggaran Perda dan Perkada Kota Bekasi tahun 2022 sebesar 122,25 persen, yaitu dengan capaian Prosentase Penurunan Tingkat pelanggaran Perda dan Perkada sebesar 9,28 persen dari target sebesar 8 persen.

Untuk melihat perbandingan capaian Indikator Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Tahun 2021 dan 2022 tidak dapat dilakukan mengingat terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama yang berpengaruh terhadap perbedaan sumber data variabel penghitungan yang digunakan.

**Tabel 3.2.4**  
**Analisis Capaian Nilai Indikator Prosentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada Dengan Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	%	80	93	130	100	100	100

Adapun capaian kinerja tahun 2022 dengan menggunakan indikator prosentase penurunan tingkat pelanggaran perda dan perkada dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.5**  
**Analisis Capaian Nilai Indikator Prosentase Penurunan**  
**Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada**  
**Dengan Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	%	80	93	130			
Setelah Penyesuaian Tupoksi								
1.	Prosentase Penurunan Tingkat pelanggaran Perda dan Perkada					100	100	100

Jika dikaitkan dengan target akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.6**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja**  
**Utama Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran**  
**Keamanan dan Ketertiban Terhadap Target Akhir**  
**Renstra 2018-2023**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Prosentase Penurunan Tingkat pelanggaran Perda dan Perkada	
		2022	2023
Target	%	100	100
Realisasi	%	100	-

Sumber: Diolah, 2022.

Dengan melihat tabel tersebut di atas, untuk mencapai target akhir tahun Renstra pada Prosentase Penurunan Tingkat pelanggaran Perda dan Perkada sebesar 10 persen, di mana pada tahun 2022 baru mencapai 100 persen, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sudah mencapai target sebesar poin.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2023 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama persentase capaian IKK yang meningkat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian Rancangan Strategis terkait perubahan nomenklatur dan kodefikasi dalam mendukung capaian indikator sasaran.
2. Optimalisasi anggaran.
3. Peningkatan sarana dan prasarana.
4. Peningkatan kualitas pendataan dan evaluasi.
5. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Prosentase Penurunan Tingkat pelanggaran Perda dan Perkada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.7**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi**  
**Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama**  
**Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan**  
**Ketertiban**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			Rp	KEU (%)	FISIK (%)
	Satuan Polisi Pamong Praja	93.070.163.280	86.091.344.372	92,5	99,89
	Satuan Polisi Pamong Praja	93.070.163.280	86.091.344.372	92,5	99,89
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	73.647.796.940	69.140.453.672	93,88	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.780.058.000	34.066.979.603	92,62	100
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.780.058.000	34.066.979.603	92,62	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.002.000	24.950.000	41,58	100
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	15.000.000	30	100
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.002.000	9.950.000	99,48	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	665.000.000	635.041.586	95,49	100
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.000.000	74.509.000	99,35	100
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000	49.512.312	99,02	100
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	326.079.000	315.857.750	96,87	100
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	83.921.000	72.605.550	86,52	100
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	29.874.000	99,58	100
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	92.682.974	92,68	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000	83.350.000	83,35	100
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	83.350.000	83,35	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.168.298.940	32.507.966.040	95,14	100
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	825.000.000	733.220.971	88,88	100
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.343.298.940	31.774.745.069	95,3	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.874.438.000	1.822.166.443	97,21	100
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	149.488.000	146.980.558	98,32	100
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.399.950.000	1.353.452.985	96,68	100
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.000.000	123.850.000	99,08	100

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2022

16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	197.882.900	98,94	<b>100</b>
	<b>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>19.422.366.340</b>	<b>16.950.890.700</b>	<b>87,28</b>	<b>99,46</b>
	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>18.522.366.340</b>	<b>16.178.191.200</b>	<b>87,34</b>	<b>99,43</b>
17	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	500.000.000	420.029.500	84,01	<b>100</b>
18	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	667.760.000	505.521.000	75,7	<b>100</b>
19	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	425.000.000	227.913.000	53,63	<b>100</b>
20	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.820.382.440	13.344.501.400	90,04	<b>100</b>
21	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	554.000.000	539.218.000	97,33	<b>100</b>
22	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	414.350.000	323.522.000	78,08	<b>100</b>
23	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.035.498.900	817.486.300	78,95	<b>100</b>
24	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	105.375.000	0	0	<b>0</b>
	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>700.000.000</b>	<b>593.699.500</b>	<b>84,81</b>	<b>100</b>
25	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	200.000.000	193.834.500	96,92	<b>100</b>
26	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	200.000.000	198.330.000	99,17	<b>100</b>
27	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	300.000.000	201.535.000	67,18	<b>100</b>
	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>200.000.000</b>	<b>179.000.000</b>	<b>89,5</b>	<b>100</b>
28	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	200.000.000	179.000.000	89,5	<b>100</b>
<b>TOTAL</b>		<b>93.070.163.280</b>	<b>86.091.344.372</b>	<b>92,5</b>	<b>99,89</b>

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2022, diolah



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan dan 27 (sub kegiatan) yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 93.070.163.280,- (*Sembilan puluh tiga milyar tujuh puluh juta serratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 86.091.344.372,-(*Delapan puluh enam milyar Sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase Penurunan Jumlah Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada hanya mencapai 92.5 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, karena meskipun terdapat sisa anggaran tetapi capaian kinerja tercapai dan ini dapat juga diartikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2021 dapat mempertahankan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

Hal tersebut disebabkan karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2022 melakukan beberapa upaya efisiensi sumber daya untuk mencapai indikator sasaran strategis Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2022 yaitu :

1. Optimalisasi sumber daya manusia berupa optimaliasi kinerja petugas di lapangan;
2. Peningkatan koordinasi internal dan eksternal.

Jumlah personil yang mendukung pencapaian indicator sasaran strategis Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel.3.2.8**  
**Jumlah personil yang mendukung pencapaian indicator**  
**sasaran strategis Persentase Penurunan Tingkat**  
**Pelanggaran Perda dan Perkada**

No	Bidang	Jumlah Personil	
		ASN	Non ASN
1	Bidang Trantibumas	173	452
2	Bidang Penegakan Perda	14	12
3	Bidang Pembinaan	9	4
4	Bidang Linmas	7	7

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja**

**2. Nilai AKIP**

Indikator pencapaian nilai AKIP ditetapkan sebagai indikator sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk mengukur sejauh mana tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Indikator ini juga untuk menunjang Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran pada Misi V RPJMD 2018-2023.

Pengukuran nilai AKIP pada Setiap Instansi Pemerintah adalah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun pedoman pengukuran

pencapaian nilai indikator tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Pemerintah yang diturunkan pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi.

Evaluasi terhadap capaian nilai AKIP meliputi penilaian terhadap 5 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Hasil Kinerja.

Capaian nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada tahun 2022 diperoleh nilai BB dari target nilai B. Dengan demikian capaian kinerja indikator persentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban sebesar BB. Adapun capaian target indikator nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.9**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi TA.2022**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022
			Target	Realisasi	
1	Pencapaian Nilai AKIP	Persen	A	A	Terlampau

Sumber: Diolah, 2022.

Dengan melihat tabel di atas, maka jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada tahun 2022 telah mampu melampaui target nilai B pada pencapaian nilai AKIP, adapun pencapaian nilai AKIP tahun 2022 dengan nilai BB merupakan peningkatan terhadap tingkat akuntabilitas kinerja yang menunjukkan tingkat efektivitas dan Efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dna penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Adapun Akumulasi Rincian Penilaian terhadap komponen-komponen yang dinilai sehingga dapat menghasilkan tingkat akuntabilitas kinerja BB berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP SKPD nomor 700/1075-LHE.SAKIP/ITKO Tahun 2022 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.2.10**  
**Rincian Hasil Penilaian Komponen AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2022**

No	Komponen Yang Dinilai	2022	
		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,69
b.	Pengukuran Kinerja	30	24,04
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,37
d.	Evaluasi Kinerja	25	19,97
	Nilai Hasil Evaluasi	100	80,07
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP SKPD nomor 700/1075-LHE.SAKIP/ITKO Tahun 2022

Dan bila dibandingkan dengan hasil penilaian pada tahun 2021 terdapat kenaikan nilai terhadap beberapa komponen yang dinilai di Tahun 2022 . Adapun perbandingan komponen yang dinilai pada tahun 2021 dengan 2022 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.2.11**  
**Perbandingan Hasil Penilaian Komponen AKIP Satuan**  
**Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2022**

No	Komponen Yang Dinilai	Tahun	
		2021	2022
1.	Perencana Kinerja	27,15	23,69
2.	Pengukuran Kinerja	19,06	24,04
3.	Pelaporan Kinerja	9,59	12,37
4.	Evaluasi Kinerja	6,85	19,97
	Nilai Hasil Evaluasi	79,15	80,07
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB	A

*Sumber: Olahan Sub Bagian Perencanaa, 2022*

Adapun beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam mempertahankan pencapaian nilai AKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi diantaranya:

1. Monitoring atas pelaporan kinerja;
2. Perbaikan perencanaan kinerja dan evaluasi kinerja.

Pencapaian nilai AKIP didukung oleh Indikator Program pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagai berikut:

**Tabel 3.2.12**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Program terhadap**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian Nilai AKIP**

No	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
1	Prosentase Keuangan Perangkat Daerah	%	100%	100 %
2	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100 %	100 %
3	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100 %	100 %
4	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100 %	100 %
5	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100 %	100 %
6	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100 %	100 %

*Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi , 2022*

Dengan melihat 2 (dua) capaian indikator program yang mendukung capaian Indikator Pencapaian Nilai AKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja, dimana ketigaindikator tercapai maka sangat wajar apabila capaian kinerja Pencapaian Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tahun 2022 adalah A, yaitu dengan capaian Pencapaian Nilai AKIP dengan tingkat akuntabilitas A dari target A.

Untuk melihat perbandingan capaian Indikator Pencapaian Nilai AKIP Tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.13**  
**Analisis Capaian Nilai Indikator Pencapaian Nilai AKIP**  
**Dengan Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Target	Target	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Nilai AKIP	%	BB	BB	BB	A	A	Terlampai

Dilihat dari tabel diatas capaian Indikator Pencapaian Nilai AKIP pada tahun 2022 dibandingkan dengan capaian Indikator Pencapaian Nilai AKIP pada tahun 2021 menunjukkan hasil yang cukup baik yakni mampu mempertahankan tingkat akuntabilitas kinerja. Hal tersebut tentunya menjadi penyemangat bagi Kota Bekasi untuk meningkatkan terus kinerja pencapaian nilai AKIP untuk kedepannya.

Untuk Capaian Pencapaian Nilai AKIP Tahun 2022 tersebut, jika dikaitkan dengan target akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.14**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja**  
**Utama Pencapaian Nilai AKIP Terhadap Target Akhir**  
**Renstra 2018-2023**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban	
		2022	2023
Target	%	A	AA
Realisasi	%	80,07	-

Sumber: Diolah, 2022.

Dengan melihat tabel tersebut di atas, untuk mencapai target akhir tahun Renstra pada Pencapaian Nilai AKIP “B”, di

mana pada tahun 2022 telah mencapai hasil A, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sudah melampaui target nilai A dengan capaian A yang menjadi sebagai pemicu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam mempertahankan nilai tersebut di tahun berikutnya.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2022 untuk mempertahankan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Pencapaian Nilai AKIP di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Monitoring atas pelaporan kinerja;
2. Perbaikan perencanaan kinerja dan evaluasi kinerja.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama pencapaian Nilai AKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.2.15**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama pencapaian Nilai AKIP**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			Rp	KEU (%)	FISIK (%)
	Satuan Polisi Pamong Praja	93.070.163.280	86.091.344.372	92,5	99,89
	Satuan Polisi Pamong Praja	93.070.163.280	86.091.344.372	92,5	99,89
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	73.647.796.940	69.140.453.672	93,88	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.780.058.000	34.066.979.603	92,62	100
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.780.058.000	34.066.979.603	92,62	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.002.000	24.950.000	41,58	100
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	15.000.000	30	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2022

3	<b>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</b>	10.002.000	9.950.000	99,48	<b>100</b>
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>665.000.000</b>	<b>635.041.586</b>	<b>95,49</b>	<b>100</b>
4	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	75.000.000	74.509.000	99,35	<b>100</b>
5	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	50.000.000	49.512.312	99,02	<b>100</b>
6	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	326.079.000	315.857.750	96,87	<b>100</b>
7	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	83.921.000	72.605.550	86,52	<b>100</b>
8	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	30.000.000	29.874.000	99,58	<b>100</b>
9	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	100.000.000	92.682.974	92,68	<b>100</b>
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100.000.000</b>	<b>83.350.000</b>	<b>83,35</b>	<b>100</b>
10	<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	100.000.000	83.350.000	83,35	<b>100</b>
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>34.168.298.940</b>	<b>32.507.966.040</b>	<b>95,14</b>	<b>100</b>
11	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	825.000.000	733.220.971	88,88	<b>100</b>
12	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	33.343.298.940	31.774.745.069	95,3	<b>100</b>
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.874.438.000</b>	<b>1.822.166.443</b>	<b>97,21</b>	<b>100</b>
13	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	149.488.000	146.980.558	98,32	<b>100</b>
14	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	1.399.950.000	1.353.452.985	96,68	<b>100</b>
15	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	125.000.000	123.850.000	99,08	<b>100</b>
16	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	200.000.000	197.882.900	98,94	<b>100</b>
	<b>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>19.422.366.340</b>	<b>16.950.890.700</b>	<b>87,28</b>	<b>99,46</b>
	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>18.522.366.340</b>	<b>16.178.191.200</b>	<b>87,34</b>	<b>99,43</b>
17	<b>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</b>	500.000.000	420.029.500	84,01	<b>100</b>
18	<b>Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</b>	667.760.000	505.521.000	75,7	<b>100</b>
19	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota</b>	425.000.000	227.913.000	53,63	<b>100</b>

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2022

20	<b>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	14.820.382.440	13.344.501.400	90,04	<b>100</b>
21	<b>Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia</b>	554.000.000	539.218.000	97,33	<b>100</b>
22	<b>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	414.350.000	323.522.000	78,08	<b>100</b>
23	<b>Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	1.035.498.900	817.486.300	78,95	<b>100</b>
24	<b>Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada</b>	105.375.000	0	0	<b>0</b>
	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>700.000.000</b>	<b>593.699.500</b>	<b>84,81</b>	<b>100</b>
25	<b>Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	200.000.000	193.834.500	96,92	<b>100</b>
26	<b>Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	200.000.000	198.330.000	99,17	<b>100</b>
27	<b>Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	300.000.000	201.535.000	67,18	<b>100</b>
	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>200.000.000</b>	<b>179.000.000</b>	<b>89,5</b>	<b>100</b>
28	<b>Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS</b>	200.000.000	179.000.000	89,5	<b>100</b>
<b>TOTAL</b>		<b>93.070.163.280</b>	<b>86.091.344.372</b>	<b>92,5</b>	<b>99,89</b>

*Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2020, diolah*

Jumlah personil yang mendukung pencapaian indicator sasaran strategis pencapaian Nilai AKIP di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 3.2.16**  
**Jumlah personil yang mendukung pencapaian indicator sasaran strategis pencapaian Nilai AKIP**

No	Bidang	Jumlah Personil	
		ASN	Non ASN
1	Bidang Sekretariat	16	24

### **3. Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat**

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2001 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu cara pengukuran kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tersebut dilakukan untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat dimana pengertian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) itu sendiri memiliki pengertian adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berpedoman Penyusunan

pada Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dimana Untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik baik yang bersifat barang, jasa maupun administratif digunakan 9 (Sembilan) unsur penting yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku

Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan pengaduan saran dan Masukan yang diukur terhadap 7 (jenis) jenis layanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yaitu:

1. Penertiban Kantrantibum di Lingkup Pemkot Bekasi
2. Pelayanan Penanganan Unjuk Rasa
3. Pelayanan Penertiban Bangunan Tidak Berijin
4. Pelayanan Penertiban THPP, Miras dan PSK
5. Pelayanan Penertiban PMKS
6. Pelayanan Penertiban Reklame Tidak Berijin

Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.17**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi TA.2022**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
			Target	Realisasi	
1	Pencapaian Nilai IKM	Persen	B	B	Tercapai

Sumber: Diolah, 2022.

Dengan melihat tabel di atas, maka jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada tahun 2022 telah mampu mencapai target nilai B sebesar target 85,74 poin, pada pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), adapun pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 dengan nilai B, yaitu sebesar 84,30 poin, maka capaian kinerja tahun 2022 atas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah Tercapai.

Dalam mengukur kinerja pelayanan publik di Kota Bekasi, digunakan indikator Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM baik. pada Unit pelayanan Satpol PP Kota Bekasi diperoleh dari data Survey terhadap 460 responden yang telah dimintai pendapat mengenai pengalamannya dalam memperoleh pelayanan dari aparatur Satpol PP. Survey dilakukan pada Semester 1 Tahun 2022, responden diminta memberikan penilaian terhadap 9 unsur pelayanan dan hasil pengisian kuesioner direkap untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan. Adapun jenis pelayanan yang disurvei adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Kantrantibum di Lingkup Pemerintah Kota Bekasi
2. Pelayanan Penanganan Unjuk Rasa
3. Pelayanan Penertiban Bangunan Tidak Berijin
4. Pelayanan Penertiban THPP, Miras dan PSK
5. Pelayanan Penertiban PMKS
6. Pelayanan Penertiban Reklame Tidak Berijin
7. Pelayanan Pengawasan Kantrantibum/Patroli Rutin

Adapun data hasil capaian penilaian IKM pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dapat terlihat pada Rekapitulasi nilai tiap unsur pelayanan dari 460 orang responden berdasarkan

data yang dihimpun dari kuesioner dengan nilai rata-rata per unsur pelayanan seperti tabel berikut ini :

**Tabel 3.2.18**  
**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan**  
**Kantrantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi**

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
1	PERSYARATAN	3.37
2	PROSEDUR	3.27
3	WAKTU PELAYANAN	3.32
4	BIAYA/TARIF	3.83
5	PRODUK PELAYANAN	3.35
6	KOMPETENSI PELAKSANA	3.08
7	PERILAKU PELAKSANA	3.17
8	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	3.27
9	SARANA DAN PRASARANA	3.27
	IKM Jenis Layanan	83.1

*Sumber : Data Laporan SKM Satpol PP tahun 2022, diolah*

**Tabel 3.2.19**  
**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan**  
**Penanganan Unjuk Rasa pada Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kota Bekasi**

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
1	PERSYARATAN	3.35
2	PROSEDUR	3.37

3	WAKTU PELAYANAN	3.32
4	BIAYA/TARIF	3.83
5	PRODUK PELAYANAN	3.3
6	KOMPETENSI PELAKSANA	3.35
7	PERILAKU PELAKSANA	3.4
8	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	3.22
9	SARANA DAN PRASARANA	3.37
	IKM Jenis Layanan	84.72

Sumber : Data Laporan SKM Satpol PP tahun 2021, diolah

**Tabel 3.2.20**  
**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan**  
**Penertiban Bangunan Tidak Berijin pada Satuan Polisi**  
**Pamong Praja Kota Bekasi**

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA- RATA
1	PERSYARATAN	3.42
2	PROSEDUR	3.56
3	WAKTU PELAYANAN	3.49
4	BIAYA/TARIF	3.82
5	PRODUK PELAYANAN	3.51
6	KOMPETENSI PELAKSANA	3.6
7	PERILAKU PELAKSANA	3.47

8	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	3.36
9	SARANA DAN PRASARANA	3.58
	IKM Jenis Pelayanan	88.38

Sumber : Data Laporan SKM Satpol PP tahun 2022, diolah

**Tabel 3.2.21**  
**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan**  
**Penertiban THPP, Miras dan PSK pada Satuan Polisi Pamong**  
**Praja Kota Bekasi**

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA- RATA
1	PERSYARATAN	3.51
2	PROSEDUR	3.38
3	WAKTU PELAYANAN	3.51
4	BIAYA/TARIF	3.94
5	PRODUK PELAYANAN	3.45
6	KOMPETENSI PELAKSANA	3.51
7	PERILAKU PELAKSANA	3.4
8	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	3.44
9	SARANA DAN PRASARANA	3.39
	IKM Jenis Layanan	87.54

Sumber : Data Laporan SKM Satpol PP tahun 2022, diolah



**Tabel 3.2.22**  
**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan**  
**Penertiban PMKS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota**  
**Bekasi**

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
1	PERSYARATAN	3.54
2	PROSEDUR	3.47
3	WAKTU PELAYANAN	3.46
4	BIAYA/TARIF	3.89
5	PRODUK PELAYANAN	3.45
6	KOMPETENSI PELAKSANA	3.41
7	PERILAKU PELAKSANA	3.41
8	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	3.36
9	SARANA DAN PRASARANA	3.49
	IKM Jenis Layanan	87.42

*Sumber : Data Laporan SKM Satpol PP tahun 2022, diolah*

**Tabel 3.2.23**  
**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan**  
**Penertiban Reklame Tidak Berijin pada Satuan Polisi Pamong**  
**Praja Kota Bekasi**

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
1	PERSYARATAN	3.57
2	PROSEDUR	3.41
3	WAKTU PELAYANAN	3.46

4	BIAYA/TARIF	3.93
5	PRODUK PELAYANAN	3.36
6	KOMPETENSI PELAKSANA	3.38
7	PERILAKU PELAKSANA	3.32
8	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	3.27
9	SARANA DAN PRASARANA	3.25
	IKM Jenis Layanan	85.96

Sumber : Data Laporan SKM Satpol PP tahun 2022, diolah

**Tabel 3.2.24**  
**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Patroli**  
**Rutin pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi**

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA- RATA
1	PERSYARATAN	3.23
2	PROSEDUR	3.17
3	WAKTU PELAYANAN	3.08
4	BIAYA/TARIF	3.63
5	PRODUK PELAYANAN	3.25
6	KOMPETENSI PELAKSANA	3.17
7	PERILAKU PELAKSANA	3.2
8	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	3.57

9	SARANA DAN PRASARANA	3.15
	IKM Jenis Layanan	81.81

Sumber : Data Laporan SKM Satpol PP tahun 2022, diolah

Dari hasil analisis terhadap rekapitulasi survey kepuasan masyarakat pada 7 jenis pelayanan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, dapat terlihat pada tabel yang disajikan berikut ini :

**Tabel 3.2.25**  
**Hasil Analisis perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**  
**Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi**

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	244	53%
		PEREMPUAN	216	47%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	0	0%
		SLTP	0	0%
		SLTA	217	47%
		DIII	5	1%
		SI	194	42%
		S2	44	10%
3	PEKERJAAN	SWASTA	151	33%
		MAHASISWA/PELAJAR	79	17%
		PEDAGANG	54	12%
		WIRASWASTA	43	9%
		LAINNYA	133	29%

4	JENIS LAYANAN	PENERTIBAN KANTRANTIBUM	60	13%
		PENANGANAN UNJUK RASA	60	13%
		PENERTIBAN BANGUNAN TIDAK BERIJIN	55	12%
		PENERTIBAN THPP, MIRAS, dan PSK	95	21%
		PENERTIBAN PMKS	74	16%
		PENERTIBAN REKLAME TIDAK BERIJIN	56	12%
		PATROLI RUTIN	60	13%

Sumber : Data Laporan SKM Satpol PP tahun 2022

Adapun rincian jenis layanan serta unsur penilaian dalam pengukuran IKM Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.2.26**  
**Perbandingan Hasil Penilaian Komponen SKM Satuan**  
**Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2022**

No	Unsur Pelayanan	Tahun	
		2021	2022
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	81,26	83,1
2.	Pelayanan Penanganan Unjuk Rasa	83,19	84,72

No	Unsur Pelayanan	Tahun	
		2021	2022
3.	Pelayanan Penertiban Bangunan Tidak Berijin	87,04	88,38
4.	Pelayanan Penertiban THPP, Miras dan PSK	87,34	87,54
5.	Pelayanan Penertiban PMKS	87,04	87,42
6.	Pelayanan Penertiban Reklame Tidak Berijin	83,93	85,96
7.	Pelayanan Pengawasan Kantrantibum/Patroli Rutin	80,30	81,81
	<b>Nilai Rata Rata</b>	<b>84,30</b>	<b>85,74</b>
	<b>Kategori penilaian</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

Sumber: Olahan Sub Bagian Perencanaan, 2022

Adapun beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam mempertahankan pencapaian nilai IKM pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi diantaranya:

1. Perilaku Petugas dalam Terkait Kesponan dan Keramahan;
2. Sarana dan Prasarana;
3. Penanganan Pangaduan Pengguna Layanan.

**Tabel 3.2.27**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Program terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian Nilai IKM**

No	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
1	Prosentase Keuangan Perangkat Daerah	%	100%	100 %

2	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100 %	100 %
3	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100 %	100 %
4	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100 %	100 %
5	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100 %	100 %
6	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100 %	100 %

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi , 2022

Dengan melihat 6 (enam) capaian indikator program yang mendukung capaian Indikator Pencapaian Nilai IKM pada Satuan Polisi Pamong Praja, dimana keenam indikator tercapai maka sangat wajar apabila capaian kinerja Pencapaian Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tahun 2022 adalah ,yaitu dengan capaian Pencapaian Nilai IKM dengan tingkat akuntabilitas “A” dari target yang direncanakan “A”.

Untuk melihat perbandingan capaian Indikator Pencapaian Nilai IKM Tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.28**  
**Analisis Capaian Nilai Indikator Pencapaian Nilai IKM**  
**Dengan Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Nilai IKM	%	B	B	Terpenuhi	B	B	Terpenuhi

Dilihat dari tabel diatas capaian Indikator Pencapaian Nilai IKM pada tahun 2022 dibandingkan dengan capaian Indikator Pencapaian Nilai IKM pada tahun 2021 menunjukkan hasil yang cukup baik yakni mampu mempertahankan tingkat akuntabilitas kinerja di kategori B. Hal tersebut tentunya menjadi penyemangat bagi Kota Bekasi untuk meningkatkan terus kinerja pencapaian nilai IKM untuk kedepannya.

Untuk Capaian Pencapaian Nilai IKM Tahun 2022 tersebut, jika dikaitkan dengan target akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.29**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja**  
**Utama Pencapaian Nilai IKM Terhadap Target Akhir**  
**Renstra 2018-2023**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban	
		2022	2023
Target	%	B	B
Realisasi	%	B	-

*Sumber: Diolah, 2022.*

Dengan melihat tabel tersebut di atas, untuk mencapai target akhir tahun Renstra pada Pencapaian Nilai IKM “B”, di mana pada tahun 2022 telah mencapai hasil B, maka Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sudah mencapai target nilai B dengan capaian B yang menjadi sebagai pemicu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam mempertahankan nilai tersebut di tahun berikutnya.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2022 untuk mempertahankan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Pencapaian Nilai IKM di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas baik dalam pengambilan keputusan, dari pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik;
2. Meningkatkan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama pencapaian Nilai IKM pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.30**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			Rp	KEU (%)	FISIK (%)
	Satuan Polisi Pamong Praja	93.070.163.280	86.091.344.372	92,5	99,89
	Satuan Polisi Pamong Praja	93.070.163.280	86.091.344.372	92,5	99,89
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	73.647.796.940	69.140.453.672	93,88	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.780.058.000	34.066.979.603	92,62	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2022

1	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	36.780.058.000	34.066.979.603	92,62	<b>100</b>
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>60.002.000</b>	<b>24.950.000</b>	<b>41,58</b>	<b>100</b>
2	<b>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	50.000.000	15.000.000	30	<b>100</b>
3	<b>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</b>	10.002.000	9.950.000	99,48	<b>100</b>
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>665.000.000</b>	<b>635.041.586</b>	<b>95,49</b>	<b>100</b>
4	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	75.000.000	74.509.000	99,35	<b>100</b>
5	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	50.000.000	49.512.312	99,02	<b>100</b>
6	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	326.079.000	315.857.750	96,87	<b>100</b>
7	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	83.921.000	72.605.550	86,52	<b>100</b>
8	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	30.000.000	29.874.000	99,58	<b>100</b>
9	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	100.000.000	92.682.974	92,68	<b>100</b>
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100.000.000</b>	<b>83.350.000</b>	<b>83,35</b>	<b>100</b>
10	<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	100.000.000	83.350.000	83,35	<b>100</b>
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>34.168.298.940</b>	<b>32.507.966.040</b>	<b>95,14</b>	<b>100</b>
11	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	825.000.000	733.220.971	88,88	<b>100</b>
12	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	33.343.298.940	31.774.745.069	95,3	<b>100</b>
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.874.438.000</b>	<b>1.822.166.443</b>	<b>97,21</b>	<b>100</b>
13	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	149.488.000	146.980.558	98,32	<b>100</b>
14	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	1.399.950.000	1.353.452.985	96,68	<b>100</b>
15	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	125.000.000	123.850.000	99,08	<b>100</b>
16	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	200.000.000	197.882.900	98,94	<b>100</b>
	<b>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>19.422.366.340</b>	<b>16.950.890.700</b>	<b>87,28</b>	<b>99,46</b>
	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>18.522.366.340</b>	<b>16.178.191.200</b>	<b>87,34</b>	<b>99,43</b>
17	<b>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</b>	500.000.000	420.029.500	84,01	<b>100</b>
18	<b>Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</b>	667.760.000	505.521.000	75,7	<b>100</b>

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2022

19	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota</b>	425.000.000	227.913.000	53,63	<b>100</b>
20	<b>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	14.820.382.440	13.344.501.400	90,04	<b>100</b>
21	<b>Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia</b>	554.000.000	539.218.000	97,33	<b>100</b>
22	<b>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	414.350.000	323.522.000	78,08	<b>100</b>
23	<b>Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	1.035.498.900	817.486.300	78,95	<b>100</b>
24	<b>Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada</b>	105.375.000	0	0	<b>0</b>
	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>700.000.000</b>	<b>593.699.500</b>	<b>84,81</b>	<b>100</b>
25	<b>Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	200.000.000	193.834.500	96,92	<b>100</b>
26	<b>Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	200.000.000	198.330.000	99,17	<b>100</b>
27	<b>Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	300.000.000	201.535.000	67,18	<b>100</b>
	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>200.000.000</b>	<b>179.000.000</b>	<b>89,5</b>	<b>100</b>
28	<b>Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS</b>	200.000.000	179.000.000	89,5	<b>100</b>
<b>TOTAL</b>		<b>93.070.163.280</b>	<b>86.091.344.372</b>	<b>92,5</b>	<b>99,89</b>

*Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2021, diolah*  
Jumlah personil yang mendukung pencapaian indicator sasaran strategis capaian Nilai IKM di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel.3.2.31**  
**Jumlah personil yang mendukung pencapaian indicator sasaran strategis Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada**

No	Bidang	Jumlah Personil	
		ASN	Non ASN
1	Bidang Trantibumas	173	452

2	Bidang Penegakan Perda	14	12
3	Bidang Pembinaan	9	4
4	Bidang Linmas	7	7

### 3.3. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Bekasi telah mengalokasikan anggaran melalui program dan kegiatan yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut, Total anggaran pelayanan dasar untuk Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 93.070.163.280 (*Sembilan puluh Tiga Miliar Tujuh Puluh Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 86.091.344.372,- (*Delapan puluh enam Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*). Jika dibandingkan dengan APBD Kota Bekasi Tahun 2022 yaitu Rp. 6.750.930.904.273,- (*Enam Triliun Tujuh Ratus Lima Puluh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) maka alokasi anggaran Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah 1,39%. Adapun rincian program dan kegiatan untuk pelayanan dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3.3.1**  
**Program, Kegiatan dan Anggaran**  
**Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			Rp	KEU (%)	FISIK (%)
	Satuan Polisi Pamong Praja	93.070.163.280	86.091.344.372	92,5	99,89
	Satuan Polisi Pamong Praja	93.070.163.280	86.091.344.372	92,5	99,89
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	73.647.796.940	69.140.453.672	93,88	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.780.058.000	34.066.979.603	92,62	100
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.780.058.000	34.066.979.603	92,62	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.002.000	24.950.000	41,58	100
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	15.000.000	30	100
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.002.000	9.950.000	99,48	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	665.000.000	635.041.586	95,49	100
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.000.000	74.509.000	99,35	100
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000	49.512.312	99,02	100
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	326.079.000	315.857.750	96,87	100
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	83.921.000	72.605.550	86,52	100
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	29.874.000	99,58	100
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	92.682.974	92,68	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000	83.350.000	83,35	100
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	83.350.000	83,35	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.168.298.940	32.507.966.040	95,14	100
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	825.000.000	733.220.971	88,88	100
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.343.298.940	31.774.745.069	95,3	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.874.438.000	1.822.166.443	97,21	100
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	149.488.000	146.980.558	98,32	100
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.399.950.000	1.353.452.985	96,68	100
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.000.000	123.850.000	99,08	100
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	197.882.900	98,94	100
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	19.422.366.340	16.950.890.700	87,28	99,46

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2022

	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>18.522.366.340</b>	<b>16.178.191.200</b>	<b>87,34</b>	<b>99,43</b>
17	<b>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</b>	500.000.000	420.029.500	84,01	<b>100</b>
18	<b>Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</b>	667.760.000	505.521.000	75,7	<b>100</b>
19	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota</b>	425.000.000	227.913.000	53,63	<b>100</b>
20	<b>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	14.820.382.440	13.344.501.400	90,04	<b>100</b>
21	<b>Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia</b>	554.000.000	539.218.000	97,33	<b>100</b>
22	<b>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	414.350.000	323.522.000	78,08	<b>100</b>
23	<b>Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	1.035.498.900	817.486.300	78,95	<b>100</b>
24	<b>Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada</b>	105.375.000	0	0	<b>0</b>
	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>700.000.000</b>	<b>593.699.500</b>	<b>84,81</b>	<b>100</b>
25	<b>Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	200.000.000	193.834.500	96,92	<b>100</b>
26	<b>Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	200.000.000	198.330.000	99,17	<b>100</b>
27	<b>Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	300.000.000	201.535.000	67,18	<b>100</b>
	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>200.000.000</b>	<b>179.000.000</b>	<b>89,5</b>	<b>100</b>
28	<b>Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS</b>	200.000.000	179.000.000	89,5	<b>100</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>93.070.163.280</b>	<b>86.091.344.372</b>	<b>92,5</b>	<b>99,89</b>

Sumber: Sub Bagian Keuangan 2022, diolah

Penyerapan anggaran sebesar 92,4% dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan pimpinan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran;
2. Pengumpulan data dan informasi serta penyebarluasan produk dan dokumen kebijakan yang dilakukan melalui koordinasi dengan menggunakan teknologi informasi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2022 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2022 ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target. Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan

jangka menengah (dalam hal ini RENSTRA), maka terlihat bahwa pada tahun 2022 ini hampir keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai, bahkan ada beberapa yang melebihi target. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 terpenuhi sesuai dengan harapan.

#### **4.2 RENCANA TINDAK LANJUT**

Berdasarkan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2022, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya. Beberapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya :

1. LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi merupakan hasil pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dicapai, oleh karena itu penyusun berharap adanya dukungan kerjasama antara berbagai pihak khususnya di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi agar terjalin komunikasi yang baik.
2. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terutama dalam penyusunan Program yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi agar dapat mempertimbangkan perkembangan isu strategis/perubahan regulasi lokal, regional, dan nasional, sehingga dapat dengan cepat dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kewenangannya;
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur. Di samping mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, hal penting



lainnya adalah kapasitas sumberdaya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

4. Meningkatkan kualitas data dan informasi atas capaian kinerja. Capaian kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan SOP pengumpulan data merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang selaras dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan melalui visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan. Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang.